

Daftar Isi
Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Buku	Bab	Bagian	Par		
Kesatu	Ketentuan Umum				
	I	Pengertian Istilah		3	
	II	Asas, Prinsip dan Tujuan		7	
Kedua	Penyelenggara Pemilu				
	I	KPU		9	
		Kesatu	Umum	9	
		Kedua	Kedudukan, Status dan Keanggotaan	10	
		Ketiga	Tugas, Wewenang dan Kewajiban	12	
		1	KPU	12	
		2	KPU Provinsi	15	
		3	KPU Kabupaten / Kota	18	
		Keempat	Persyaratan	21	
		Kelima	Pengangkatan dan Pemberhentian	23	
		1	KPU	23	
		2	KPU Provinsi	27	
		3	KPU Kabupaten / Kota	30	
		4	Sumpah / Janji	33	
		5	Pemberhentian	34	
		Keenam	Mekanisme Pengambilan Keputusan	37	
		Ketujuh	Pertanggung Jawaban dan Pelaporan	40	
		Kedelapan	Panitia Pemilihan	41	
		1	PPK	41	
		2	PPS	44	
		3	KPPS	46	
		4	PPLN	48	
		5	KPPSLN	50	
		6	Persyaratan	52	
		7	Sumpah / Janji	53	
		8	Pemberhentian	54	
		Kesembilan	Peraturan dan Keputusan KPU	55	
		Kesepuluh	Kesekretariatan	56	
		1	Susunan	56	
		2	Tugas dan Wewenang	59	
		II	Pengawas Pemilu		
	Kesatu		Umum	62	
	Kedua		Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan	63	
	Ketiga		Tugas, Wewenang dan Kewajiban	65	
	1		Bawaslu	65	
	2		Bawaslu Provinsi	70	
3	Bawaslu Kabupaten / Kota		74		
4	Panwaslu Kecamatan		79		
5	Panwaslu Kelurahan / Desa		83		
6	Panwaslu LN		85		
7	Pengawas TPS		87		
Keempat	Persyaratan		88		

==

Buku	Bab	Bagian	Par	
Ketiga		Kelima	Pengangkatan dan Pemberhentian	90
		1	Bawaslu	90
		2	Bawaslu Provinsi	93
		3	Bawaslu Kabupaten / Kota	96
		4	Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan / Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS	99
		5	Sumpah / Janji	100
		Keenam	Pemberhentian	101
		Ketujuh	Pertanggung Jawaban dan Pelaporan	107
		Kedelapan	Peraturan dan Keputusan Pengawas Pemilu	108
		Kesembilan	Kesekretariatan	109
	III	DKPP		111
	Pelaksanaan Pemilu			
	I	Umum		116
	II	Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu		117
		Kesatu	Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	117
		Kedua	Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	120
		1	Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu	120
		2	Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu	122
		3	Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	124
		4	Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu	124
		5	Pengawasan Atas Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	125
		Ketiga	Peserta Pemilu DPD	125
		Keempat	Ketentuan Saat Pendaftaran Bagi Calon Peserta Pemilu Yang Kepengurusan Partai Politiknya Terjadi Perselisihan	128
	III	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		130
		Kesatu	Prinsip Penyusunan Daerah Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	130
		Kedua	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR	130
		Ketiga	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Provinsi	131
		Keempat	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPR Kabupaten / Kota	133
		Kelima	Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPD	136
	IV	Hak Memilih		137
	V	Penyusunan Daftar Pemilih		137
		Kesatu	Data Kependudukan	137
		Kedua	Daftar Pemilih	139
		Ketiga	Pemutakhiran Data Pemilih	139
		Keempat	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	140
		Kelima	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	141
		Keenam	Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Luar Negeri	143
		Ketujuh	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap	145
		Kedelapan	Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan Dalam Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih	146

==

Buku	Bab	Bagian	Par	
	VI		Pengusulan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	147
		Kesatu	Tata Cara Penentuan, Pengusulan dan Peetapan Pasangan Calon	147
		1	Tata Cara Penentuan Pasangan Calo	147
		2	Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	149
		3	Verifikasi Bakal Pasangan Calon	152
		4	Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon	155
		5	Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Adminitrasi Pasangan Calon	157
		Kedua	Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	158
		1	Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	158
		2	Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	161
		3	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota	163
		4	Pengawasan atas Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota	164
		5	Penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	165
		6	Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPR dan DPRD	168
		7	Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggta DPD	169
		8	Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPD	170
		9	Pengawasan Atas Verifikasi Kelengkapan Adminitrasi Bakal Calon Anggota DPD	171
		10	Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPD	171
		11	Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPD	173
	VII		Kampanye Pemilu	173
		Kesatu	Umum	173
		Kedua	Materi Kampanye	175
		Ketiga	Metode Kampanye	176
		Keempat	Larangan dalam Kampanye	179
		Kelima	Sanksi atas Pelanggaran Larangan Kampanye	182
		Keenam	Pemberitaan, Penyaran dan Iklan Kampanye	183
		1	Umum	183
		2	Pemberitaan Kampanye	185
		3	Penyiaran Kampanye	185
		4	Iklan Kampanye	186
		Ketujuh	Pemasangan Alat Peraga	188

==

Buku	Bab	Bagian	Par	
		Kedelapan	Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan Pejabat Negara Lainnya	189
		Kesembilan	Peranan Pemerintah, TNI dan Polri	192
		Kesepuluh	Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye Pemilu	193
		Kesebelas	Dana Kampanye Pemilu	202
		1	Dana Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	202
		2	Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota	204
		3	Dana Kampanye Pemilu Anggota DPD	206
		4	Laporan Dana Kampanye	207
VIII		Pemungutan Suara		211
		Kesatu	Perlengkapan Pemungutan Suara	211
		Kedua	Pemungutan Suara	215
IX		Pemungutan Suara Ulang, Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang		227
		Kesatu	Pemungutan Suara Ulang	227
		Kedua	Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Suara Ulang	
X		Penghitungan Suara		232
		Kesatu	Umum	232
		Kedua	Penghitungan Suara di TPS / TPSLN	233
		Ketiga	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan	238
		Keempat	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten / Kota	241
		Kelima	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Provinsi	243
		Keenam	Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Secara Nasional	245
		Ketujuh	Pengawasan dan Sanksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	247
XI		Penetapan Hasil Pemilu		248
XII		Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih		250
		Kesatu	Penetapan Perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden	250
		Kedua	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD dan DPRD	251
		1	Penetapan Perolehan Kursi	251
		2	Penetapan Calon Terpilih	252
		3	Pemberitahuan Calon Terpilih	253
		4	Penggantian Calon Terpilih	254
XIII		Pelantikan dan Pengucapan Sumpah / Janji		255
XIV		Pemilu Lanjutan dan Pemilu Susulan		257
XV		Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah		258
XVI		Pemantauan Pemilu		259
		Kesatu	Pemantau Pemilu	259
		Kedua	Persyaratan dan Tata Cara Menjadi Pemantau Pemilu	259
		Ketiga	Wilayah Kerja Pemantau Pemilu	261
		Keempat	Tanda Pengenal Pemantau Pemilu	262
		Kelima	Hak dan Kewajiban Pemantau Pemilu	263
		Keenam	Larangan Bagi Pemantau Pemilu	264

==

Buku	Bab	Bagian	Par		
Keempat		Ketujuh	Sanksi Bagi Pemantau Pemilu	265	
		Kedelapan	Pelaksanaan Pemantauan	266	
	XVII	Partisipasi Masyarakat		266	
	XVIII	Pendanaan		268	
		Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu			
	I	Pelanggaran Pemilu		269	
		Kesatu	Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu	269	
		Kedua	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	271	
		Ketiga	Pelanggaran Administratif Pemilu	274	
			1 Umum	274	
			2 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu	274	
	II	Sengketa Proses Pemilu		277	
		Kesatu	Umum	277	
		Kedua	Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	277	
		Ketiga	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu	278	
		Keempat	Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara	279	
			1 Umum	279	
			2 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara	280	
			3 Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu	281	
	Kelima	III	Perselisihan Hasil Pemilu		282
		Kesatu	Umum	282	
		Kedua	Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu	282	
		Tindak Pidana Pemilu			
I		Penanganan Tindak Pidana Pemilu		284	
		Kesatu	Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu	284	
		Kedua	Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu	287	
		Ketiga	Sentra Penegakkan Hukum Terpadu	288	
II		Ketentuan Pidana Pemilu		290	
Keenam		Penutup			
	I	Ketentuan Lain - lain		309	
	II	Ketentuan Peralihan		311	
	III	Penutup		315	

==